



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023



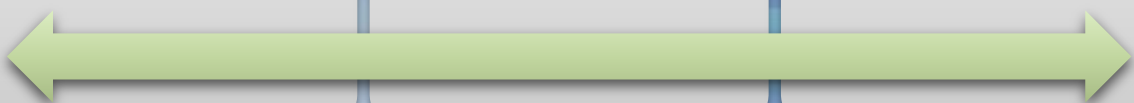
Komunikasi



Informatika



Statistik dan Persandian





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. Syairani Pelaihari 70814

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, kami Tim Penyusun Renstra pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Laut telah menyelesaikan pekerjaan untuk menyusun Renstra tahun 2018 - 2023.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut, Nomor 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu di masa mendatang sektor komunikasi dan Informatika diharapkan bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya turut membawa Kabupaten Tanah Laut menjadi Kabupaten Tanah Laut Yang Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi (Berinteraksi).

Selanjutnya Dokumen Renstra ini diharapkan memberikan arahan positif bagi dinas teknis yang bersangkutan.

Pelaihari, 24 Juni 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Kata Pengantar</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ...	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Komunikasi	7
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	24
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3 Telaah Renstra Kementrian Kominfo, dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan	27
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, S E R T A PENDANAAN.....	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VIII PENUTUP	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi mengacu kepada system sentralisasi melainkan sudah menganut sistem desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* atau *electronic Government (e-Government)*. Hal mana dapat mendukung penerapan *Government to Government (G2G)*, *Government to Citizen (G2C)* dan *Government to Business (G2B)*.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hendaknya memakai tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai RAPBD.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa perangkat organisasi yang menyertainya mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang komunikasi dan informasi dalam menyusun dokumen perencanaan strategis (renstra) akan mengacu pada

arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan.

Oleh karenanya, dalam menyusun dokumen Renstra harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat baik lingkungan eksternal (regulasi, perkembangan Teknologi Informasi) maupun lingkungan internal (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam penyusunan dokumen strategis (Renstra SKPD). Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informasi, menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penyusunan berbagai kebijakan teknis termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Namun diakui dan disadari bahwa untuk mengimplementasikan secara konsisten dokumen perencanaan tersebut masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah baik pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, komitmen untuk mampu mengimplementasikan secara konsisten.

Dengan semangat otonomi dibarengi regulasi yang semakin lengkap tentu ini tidak menjadikan alasan terhentinya program kegiatan tapi menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Olehnya itu penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut lebih berorientasi pada *problem solving* dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2007-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Tanah Laut;
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;

24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang pelaksanaannya akan lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Tersedianya perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, penyiaran, jaringan dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan pengelolaan website;
2. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun kedepan (2017 - 2022) untuk kemudian diuraikan ke dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun berjalan;
3. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kekurangan yang ada serta peluang dan kendala yang diperkirakan timbul. Untuk itu dalam Renstra ini telah dirumuskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daaerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

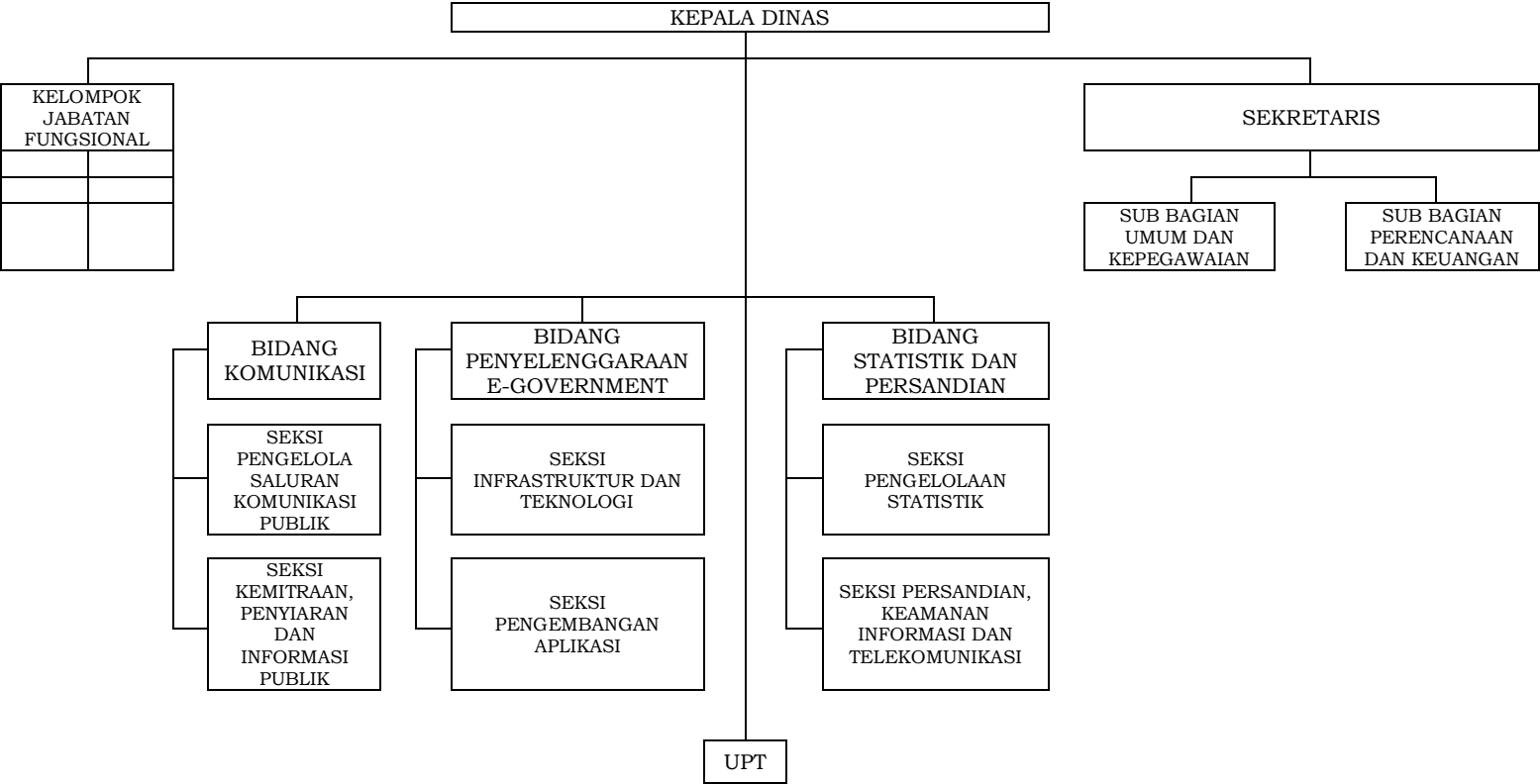
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti berikut di bawah ini:



Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 diuraikan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(4) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
- b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;

- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(5) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
- b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2018, yang *Intern* antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kekuatan SDM dapat terurai pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1

**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanah Laut berdasarkan kepangkatan**

No	KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan IV.c	-
2	Golongan IV.b	1 orang
3	Golongan IV.a	4 orang
4	Golongan III.d	4 orang
5	Golongan III.c	2 orang
6	Golongan III.b	-
7	Golongan III.a	1 orang
8	Golongan II.d	3 orang
9	Golongan II.c	4 orang
10	Golongan II.b	-
11	Golongan II.a	1 orang
Total		20 orang

Tabel 2.2.2

**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanah Laut berdasarkan pendidikan**

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana	5 orang
2	Sarjana	7 orang
3	Diploma	3 orang
4	SLTA/Sederajat	4 orang
5	SLTP/Sederajat	1 orang
Total		20 orang

Tabel 2.2.3

**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tanah Laut berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II.a	1 orang
2	Eselon III.b	1 orang
3	Eselon III.a	3 orang
4	Eselon IV.b	8 orang
5	Non Eselon	9 orang
6	Tenaga Outsourcing	15 orang
Total		37 orang

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tabel 2.2.4

Sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	KETERANGAN
1	Portable Generating Set	1	Baik	Genset Radio Tuntung Pandang
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Baik	Mobil operasional Kepala Dinas dan mobil operasional Radio Tuntung Pandang FM
3	Sepeda Motor	4	Kurang baik	Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas
4	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6	Baik	Berupa penangkal petir beserta perlengkapannya pendukungnya, tower jaringan ukuran sedang, plat besi/dak cor pelindung kabel
5	Perkakas Standar Lain-lain	14	Baik	Harness, carabiner, tali karmantel, Bag Pack, mini katrol (pulley), figure 8
6	Perkakas Khusus Lain-lain	38	Baik	Digital multimeter, LAN tester digital, bor baterai combo, harness/sabuk pengaman, Bag pack (tas peralatan), portabel iron solder, obeng set, tespen, obeng listrik, kunci inggris, kunci sock, kunci ring all pas size, Tang set, Kunci L Panjang, Crimping Tool RJ11/RJ45, pemotong kabel, Toolbox, helmet, Headlamp
7	Global Positioning System (GPS)	1	Rusak Berat	Peralatan GPS

8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Kurang Baik	-
9	Lemari Besi	9	Baik	Lemari arsip
10	Rak Besi/Metal	9	Baik	rackmount untuk penyimpan radio station, Rack Server 42/48 U, Rack Server 18/22 U, Rak besi arsip
11	Filling Besi/Metal	2	Baik	Filling Kabinet Tingkat 4 (Empat)
12	Brand Kas	1	Baik	-
13	Kardek Besi/Metal	2	Baik	Locker 5 laci
14	Lemari kayu	2	Kurang baik	Lemari 2 pintu
15	Papan Visuil	3	Baik	running text, Runing text mobil Radio tuntung pandang, Neon box mobil radio tuntung pandang
16	Papan Pengumuman	7	Baik	untuk pemberitahuan kawasan free wifi
17	Genset	2	Baik	Genset untuk Ruang RSPK
18	Mesin Pompa Air	1	Baik	-
19	Papan Nama Lainnya	1	Baik	Papan nama Radio Tuntung Pandang
20	Meja Kayu	10	Baik	meja kerja
21	Meja Reseption	1	Baik	-
22	Meja Panjang	1	Baik	Meja Jati Panjang 3m + Kursi
23	Bangku Tunggu	2	Baik	Bangku tunggu
24	Meja Komputer	1	Baik	-
25	Sofa	2	Baik	-
26	Kursi Kerja	17	Baik	Kursi kerja eselon dan staf
27	Meja Kerja	7	Baik	-
28	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik	-
29	AC Split	7	Baik	-
30	Microphone	1	Baik	Mikropon Siaran
31	Microphone Table Stand	6	Baik	Mikropon meja berdiri RSPD
32	Tandon Air	1	Baik	-
33	Mainframe	2	Baik	Server data high end, server 16 GB Ram, 2 x 1 TB
34	Personal Komputer Lain-lain	4	Baik	Management Routing, wire management, Switch (Workgroup Switches, 48 10/100/1000, 2 T/SFP LAN), H/W Firewall'
35	P.C Unit/ Komputer PC	18	Baik	-
36	Laptop	9	Baik	-
37	Note Book	2	Kurang baik	-
38	Personal Komputer Lain-lain	5	Baik	untuk pemetaan dan desain grafis, load balancing
39	Hard Disk	4	Baik	Hardisk server

40	Monitor	2	Baik	LCD Monitor
41	Printer	16	baik	-
42	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Rusak Berat	Rictifier
43	UPS	4	Baik	UPS Rackmount non expandable, UPS/Stabilizer-Informasi, UPS 10.000 VA + Railing Kit + Battery Pack
44	Stabilizer/Stavolt	1	Baik	Stabilizer / INFORMASI
45	Harddisk Eksternal	1	Baik	meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual
46	Memory	3	Baik	untuk meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual, SSD
47	Router	10	Baik	PC Bridge, Router 16 Core CPU, Omni Router, Backup Router
48	Modem	1	Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway
49	Peralatan Jaringan Lain-lain	5	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast/ gateway, jaringan FO feeder, perlengkapan, dan jasa instalasinya, jaringan intranet, perlengkapan, dan instalasinya, print server
50	Tiang Antene	7	Baik	Tiang Hotspot
51	Radio Access Point	16	Baik	Sollar cell Hotspot, Radio point multi, Radio Point to Point (Station recieve dan wds) Radio Point to Point (Station recieve dan wds) Radio point to point(station recieve dan wds)
52	Antene	2	Kurang baik	antena omni jaringan penunjang e-governm
53	Switch Hub	2	Rusak Berat	perlengkapan sms broadcast/ gateway
54	Wireless Access Point	5	Baik	Wireless Station 5 Ghz (outdoor)
55	Wireless Lan (Internal Card)	1	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast / gateway
56	Adaptor WIFI	1	Rusak Berat	wifi streaming portable
57	Proyektor + Attachment	1	Baik	water wall & proyektor
58	Telephone Hybird	1	Kurang Baik	IP Phone
59	Headphone	4		
60	Microphone/Wireless Mic	3	Baik	-
61	Microphone/Wireless	1	Baik	-

	Mic			
62	Professional Sound System	3	Baik	Sound Sistem
63	Handycam	1	Baik	-
64	Televisi	1	Rusak Berat	Televisi sekr. Korpri
65	Camera Electronic	1	Baik	-
66	Amplifier	1	Baik	Amplifier
67	Loudspeaker	2	Baik	speaker
68	Handy Talky	8	Baik	-
69	Unit Transceiver VHF Portable	1	Kurang baik	Mixer Siaran
70	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	3	Kurang baik	Repeater dan Transmitter VHF (Radio Pantau); Antena Repeater dan kelengkapannya
71	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	1	Baik	SOUND SYSTEM
72	Unit Pemancar HF/SW Stationary	1	Rusak Berat	radio repeater/ pemancar ulang
73	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	1	Kurang baik	Antena dan Instalasi
74	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	2	Baik	Tabung Pemancar Radio RSPK dan Exiter Pemancar Radio RSPK
75	Program Input Equipment Lain-lain	1	Baik	Exiter
76	Preamplifier PM Tube Bose	1	Rusak Berat	-
77	Mixer Router	1	Rusak Berat	-
78	CCTV	1	Baik	TEKNOLOGI DIGITAL SECURITY DI TITIK RAWAN KAMTIBMAS
79	CCTV	1	Baik	cctv 8 channel
80	Tabung Pemadam Api	2	Baik	-
81	Stand Microphone	5	Baik	-

Sumber Daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Jaringan komunikasi E-Government dengan ditunjang 1 unit tower jaringan dan 1 unit tower radio telekomunikasi;
2. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
3. Jaringan internet beserta infrastrukturnya;
4. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang **Ekstern**, antara lain :

1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

2. Sumber Daya Media Informasi.

Media informasi dengan kerja sama dengan lembaga penyiaran televisi lokal dan nasional Media.

Selain Radio milik Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika kerjasama dengan siaran radio lokal di Kabupaten Tanah Laut non pemerintah sebanyak 2 stasiun radio.

Media massa Cetak seperti Surat kabar, tabloid dan majalah. diperlukan kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang beredar di Kabupaten Tanah Laut.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan layanan Informasi dan komunikasi;
2. Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
3. Pengelolaan informasi melalui website;
4. Penerapan layanan berbasis e-government di daerah.

Tabel 2.3.1 (Tabel T-C.23).

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut

1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
1	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat																		
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang memiliki layanan PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) 	16 SKPD		-	-	-	-	16	14	-	-	-	16	21	-	-	-	100	131%
2	Terwujudnya penyebaran informasi berbagai media																		
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang aktif 	11 KIM		-	-	-	-	5	6	-	-	-	3	7	-	-	-	27%	63%
	Terwujudnya sarana dan prasarana berbasis TIK																		
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan informasi website 	75 % Baik		-	-	-	-	75	75	-	-	-	80,25	81,25	-	-	-	80,25 %	81,25 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang menerapkan e-government 	20 aplikasi dan jaringan		-	-	-	-	16	16	-	-	-	16	25	-	-	-	80%	125%
3	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat																		
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang mengintegrasikan data 	20 SKPD		-	-	-	-	0	20	-	-	-	0	20	-	-	-	0	100

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset <ul style="list-style-type: none"> Persentase penyerapan anggaran Dinas Kominfo Persentase ASN yang dilayani secara tertib 	95 % 100 %		- -	- -	- -	- -	95 % 100 %	95 % 100%	- -	- -	- -	81,82 % 37,86 %	86,81 % 60 %	- -	- -	- -	82% 38%	87% 60%

Tabel 2.3.2 (Tabel T-C.24).

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Komunikasi dan Informatika (RPJMD)																	
1	Terwujudnya pelayanan informasi bagi masyarakat																	
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang memiliki layanan PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) 	-	-	-	304.930.000	169.000.000	-	-	-	281.784.000	102.738.000	-	-	-	92,4%	60,79%	236.965.000	192.261.000
2	Terwujudnya penyebaran informasi berbagai media																	
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang aktif 	-	-	-	337.480.000	229.260.000	-	-	-	295.242.500	81.585.000	-	-	-	87,48%	35,59%	283.370.000	188.413.750

	Terwujudnya sarana dan prasarana berbasis TIK																	
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase indeks kepuasan informasi website 	-	-	-	2.646.440.000	856.096.800	-	-	-	2.547.798.740	374.046.000	-	-	-	96,27%	43,69%	1.751.268.400	1.460.922.370
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang menerapkan e-government 	-	-	-	316.913.000	79.206.000	-	-	-	273.505.750	23.400.000	-	-	-	86,3%	29,54%	198.059.500	148.452.875
3	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat																	
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SKPD yang mengintegrasikan data 	-	-	-	935.500	55.142.100	-	-	-	935.500	33.449.400	-	-	-	0	60,66%	28.038.800	17.192.450
4	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset																	
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyerapan anggaran Dinas Kominfo Persentase ASN yang dilayani secara tertib 	-	-	-	941.690.500	537.170.000	-	-	-	684.890.411	295.987.675	-	-	-	72,73%	55,1%	739.430.250	490.439.043

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika di daerah, agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan tupoksinya, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan, baik faktor-faktor pendukung internal kantor maupun faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal, terdiri dari:
 - a. Kekuatan
 - 1) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bidang Komunikasi dan Informasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
 - 2) Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi SKPD serta sebagai konsultan perencana pengembangan sistem informasi, pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan Integrasi Jaringan semua SKPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) SKPD secara online melalui website dengan alamat www.tanahlautkab.go.id. Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah telah tersedianya alamat subdomain masing-masing SKPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat;
 - 3) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Tanah Laut seperti: Aplikasi Web Mail, e-Absensi, e-laporan, e-surat, LPSE, SIPKD, Pegawai (SIMPEG), SiRUP;
 - 4) Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Tanah Laut;

- 5) Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tupoksinya;
- 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

b. Kelemahan.

- 1) Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf mengingat organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk;
- 2) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sangat dibutuhkan;
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat;
- 4) Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai;
- 5) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
- 6) Kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi IT dan menguasai komputer
- 7) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah.
- 8) Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika.

2. Faktor Eksternal, antara lain:

a. Peluang

- 1) Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga.
- 2) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD.

b. Tantangan

- 1) Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran daerah.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang komunikasi dan informatika yang harmonis di semua komponen yang ada.
- 3) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.
- 4) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut**

Permasalahan-permasalahan dalam hal pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada table 3.1.1, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 (Tabel T-B.35)
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai di bidang Komunikasi dan Informatika	Terbatasnya tenaga teknis dan terampil utamanya dalam penguasaan teknologi infromasi dan komunikasi	Terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin pesat
2.	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada penerapan e-Government (Pemerintahan berbasis elektronik) penunjang pelayanan publik	Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government)
3.	Kurang optimalnya pembangunan sarana dan prasarana (infrstruktur) serta pemanfaatannya dalam menunjang layanan e-Government.	Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK
4.	Masih adanya area yang belum tercover jaringan komunikasi.	Masih kurangnya cakupan wilayah layanan telekomunikasi penunjang akses informasi	Keterbatasan Ketersedian infrastruktur telekomunikasi bagi peningkatan akses informasi bagi masyarakat
5.	Terbatasnya kemampuan dalam mengelola sarana dan prasarana pendukung yang ada bagi pelaksanaan penyebaran jaringan komunikasi dan informasi	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan penyebaran jaringan komunikasi dan informasi	Terbatasnya jaringan komunikasi serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat

khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website*. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi:

- Pengolahan Data
- Pengelolaan Informasi
- Sistem Manajemen
- Proses Kerja.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (BERkarya, INovasi, TEtata, Religius, AKtual, SInergi)”

b. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
- 2) Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
- 3) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
- 5) Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang

merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov) melalui peningkatan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (1)** Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; **Misi (2)** Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; **Misi (3)** Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

Guna mendukung keberhasilan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merancang program kegiatan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Bidang urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan daerah:

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase informasi yang disebarkan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	
		Program pengelolaan komunikasi publik	
2.	Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi
		Program Pengelolaan Komunikasi Publik	
3.	Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)
4.	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Program penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan SKPD	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi
5.	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
6.	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
7.	Meningkatnya penggunaan		Persentase penggunaan

	domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut		domain tanahlautkab.go.id
8.	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu
		Program peningkatan sarana prasarana aparatur	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	
		Program pemenuhan, peningkatan, sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia	
9.	Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai RB SKPD Nilai SAKIP SKPD
		Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD	
10.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase statistik sektoral daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

“TERWUJUDNYA INDONESIA INFORMATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN KOMINFO BERKELANJUTAN,YANG MERAKYAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, DALAM RANGKA NKRI”

Misi:

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI.
2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
3. Mendorong peningkatan ayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa.
4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.

5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Dari kelima Misi tersebut adanya keterkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut pada misi (1) dan (2). Selain itu Dinas Komunikasi dan Informasi telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah di keluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

**“KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA,
BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”**

Misi:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal;
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dari kelima misi tersebut ada keterkaitan dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi ke-5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan untuk mencapai tujuan pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan SKPD, perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD,

Dan Prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Proses penelaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan pada tahap penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk diacu dalam penyusunan Rencana strategis SKPD. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam RTRW dan KLHS berperan pada Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, yakni:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan;
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi;
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet pada berbagai kawasan fungsional di Kabupaten Tanah Laut.

Telaahan RTRW bahwa Dinas Komunikasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya akan mengacu pada RTRW sebagai koridor guna mencapai sasaran dan tercapainya misi dan terwujudnya visi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam RTRW tertera bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana dan prasarana yang sangat penting dalam tahun-tahun mendatang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2018-2023
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Tanah Laut.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan dipecahkan dengan perancangan *road map* pembangunan infrastruktur E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tanah Laut *Smart Government* dan *Smart City*

Tanah Laut *Smart Government* meliputi *smart* perencanaan, monitoring, evaluasi, pembangunan kapasitas, serta implemetasi kebijakan. Sedangkan *Smart City* memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Tanah Laut memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tanah Laut *Smart city* meliputi penyediaan layanan pemerintahan, *public safety*, kependudukan *online*, *security surveilane*, *smart* UKM (pengusaha kecil dan menengah), layanan *digital park* (perpustakaan digital, konten pendidikan *online*) dan lain sebagainya. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahapan yaitu pada pembangunan *Smart Government* dan Pembangunan fasilitas *Smart City*.

2. Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Yang Berbasis Data.

Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah didasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelaksanaannya dengan tahapan perencanaan dan pembangunan *data/command center* serta jaringan fiber optik antar SKPD dan tower bersama sebagai infrastruktur penunjang dalam mendukung *Smart Government* dan *Smart City*.

3. Pelaksanaan Dan Penerapan kaidah-kaidah *e-Government*.

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 Urusan. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *E-Government* yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

4. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan beraninya masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

5. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat perlu di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersikap responsif dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Laut yaitu: ***Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu penentu dan pengendali dari pencapaian visi daerah. Untuk itu tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai salah satu lembaga teknis yang mendukung terlaksananya misi ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; misi ke-2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; dan misi ke-3 yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

A. Tujuan

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yakni sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut;
2. Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut;
3. Terwujudnya inovasi yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD;
5. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut;

B. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan ke dalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dari setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut;
2. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);

3. Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut;
4. Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi informasi;
5. Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi);
6. Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi;
7. Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
8. Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian;
9. Meningkatnya implemementasi tata kelola pemerintahan yang baik;
10. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD.

Tabel 4.1.1

Tabel misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.	Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut	<p>Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik</p> <p>Persentase peningkatan SKPD terhadap keamanan informasi</p>	<p>Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut</p> <p>Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi</p> <p>Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)</p>	<p>Persentase informasi yang disebarakan</p> <p>Persentase KIM yang terbantu dan memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)</p>
2	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut	Persentase inovasi yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi
3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Terwujudnya tata kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

				Kabupaten Tanah Laut	
				Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
				Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id
		Terwujudnya tata kelola kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu
			Persentase terlaksananya pemenuhan tata kelola pemerintahan di SKPD	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja	- Nilai Reformasi Birokrasi SKPD - Nilai SAKIP SKPD
		Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.2 (Tabel T-C.25)
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					TARGET AKHIR SASARAN
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut	Persentase peningkatan sebaran informasi dan komunikasi publik	100 %	1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	Persentase informasi yang disebar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi dan Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	27 %	100 %	27 %	27 %	27 %	100 %
		Persentase peningkatan SKPD terhadap keamanan informasi	100 %	1.3 Meningkatnya SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	2,4 %	50 %	20 %	20 %	7,6 %	100 %
2	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Persentase inovasi yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	2.1 Meningkatnya fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3	Terwujudnya tata kelola SPBE di Kabupaten Tanah Laut	Persentase SKPD yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelayanan	2,80	3.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,00	2,80	2,40	2,60	2,80	2,80
			100 %	3.2 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	8,9 %	8,9 %	8,9 %	8,9 %	8,9 %	100 %
				3.3 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	100 %	3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terlaksananya pemenuhan tata kelola pemerintahan di SKPD	100 %	3.5 Meningkatnya implementasi RB dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP SKPD	78 nilai	79 nilai	80 nilai	81 nilai	82 nilai	82 nilai
					Nilai RB SKPD	-	80 nilai	82 nilai	84 nilai	86 nilai	86 nilai
5	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	Persentase data sektoral SKPD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	3.6 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	Persentase statistik sektoral daerah	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dan berisi program-program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Sedang kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang yaitu dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 (Tabel T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”			
<p>MISI ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;</p> <p>MISI ke-2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;</p> <p>MISI ke-3: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya penyebaran informasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Laut	<p>1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut</p> <p>Indikator kinerja:</p> <p>1) Persentase informasi yang disebarkan</p> <p>1.2 Meningkatnya pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>Indikator kinerja:</p> <p>1) Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi</p>	<p>1. Meningkatkan cakupan media informasi publik.</p> <p>2. Melakukan kerjasama kemitraan dan hubungan dengan media komunikasi.</p> <p>3. Meningkatkan pengelolaan opini dan isu publik daerah.</p> <p>4. Meningkatkan layanan rekomendasi pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut.</p>	<p>1. Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam membuat program kerja di bidang komunikasi sesuai perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Melakukan kerjasama dan meningkatkan pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi publik dan media massa serta pengelolaan opini publik.</p>

	Sasaran 1.3 Meningkatkan SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi) Indikator kinerja: 1) Jumlah SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	Strategi 1. Meningkatkan pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam menjaga keamanan dokumen.	Arah Kebijakan 1. Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam membuat program kerja di bidang persandian sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	2.1 Meningkatkan fasilitasi layanan SKPD dalam pengembangan inovasi Indikator kinerja: 1) Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	1. Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 2. Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait pengembangan e-government.	1. Peraturan Bupati tentang pengembangan inovasi menggunakan teknologi informasi 2. Peraturan Bupati tentang tata kelola TIK di Kabupaten Tanah Laut dan penerapan SPBE.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Terwujudnya tata kelola SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	3.1 Meningkatkan pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Indikator kinerja: 1) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 3.2 Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1. Peningkatan kualitas SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 2. Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD terkait maupun perguruan tinggi dalam hal pengembangan e-government. 3. Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam proses kerja dan layanan publik dengan sistem data terintegrasi.	1. Peraturan Bupati tentang pengembangan dan penerapan e-Government. 2. Pelaksanaan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) di bidang penyelenggaraan e-Government. 3. Peraturan Bupati tentang tata kelola TIK di Kabupaten Tanah Laut.

	<p>Indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) <p>3.3 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut</p> <p>Indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id 		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>4. Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan</p>	<p>3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian</p> <p>Indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu <p>3.5 Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Indikator kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai RB SKPD 2) Nilai SAKIP SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaporan dan evaluasi. 2. Melakukan Kerjasama dan pemantauan internal terkait capaian kinerja dinas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5. Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	3.6 Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD Indikator kinerja: 1) Persentase statistik sektoral daerah	1. Menyediakan data statistik sektoral daerah dalam sistem satu data terintegrasi. 2. Pembangunan pusat data yang terintegrasi dengan SKPD.	1. Melakukan kerjasama dengan instansi/SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam membuat program kerja di bidang komunikasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD guna terwujudnya pusat data yang terintegrasi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan bidang urusan Komunikasi dan Informatika dalam periode 2018-2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.1 (Tabel T-C.27) berikut:

Tabel 6.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2018
Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Taget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Terwujudnya penyebaran informasi di Kabupaten Tanah Laut	1.1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut	2	01	01	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	n/a	27%	172.809.800	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	172.809.800	Bidang Komunikasi	Kabupaten Tanah Laut	
	1.2 Meningkatnya pembantuan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan teknologi informasi	2	01	03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina (aktif)	7 KIM	3 KIM	172.809.800	-	-	-	-	-	-	-	10 kelompok	172.809.800			
		2	01	01	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Cakupan layanan telekomunikasi	2 buah	2 buah	37.867.500	-	-	-	-	-	-	-	2 buah	37.867.500	Bidang Komunikasi	Kabupaten Tanah Laut	
		2	01	01	Pemeliharaan menara repeater bidang kominfo	Jumlah pemeliharaan ijin frekuensi radio komunikasi ke Kemenkominfo	2 buah	2 buah	37.867.500	-	-	-	-	-	-	-	2 buah	37.867.500			
Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE	3.1 Meningkatnya pemanfaatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Tanah Laut	2	01	01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	8,90%	1.404.868.100	8,90%	1.011.419.982	8,90%	1.111.010.009,6	8,90%	1.166.560.389	8,90%	1.283.219.970,69	8,90%	5.977.078.451	Bidang Penyelenggaraan E-Governmen t Bidang Komunikasi	Kabupaten Tanah Laut
	3.2 Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2	01	01	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD yang menerapkan SPBE	25 SKPD	4 SKPD	764.690.000	4 SKPD	856.096.800	4 SKPD	941.706.849,6	4 SKPD	988.792.192,59	4 SKPD	1.100.118.602,69	45 SKPD	4.651.404.445		
		2	01	02	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah desiminasi informasi daerah melalui media	240 informasi/berita	240 informasi/berita	568.898.100	-	-	-	-	-	-	-	-	568.898.100			
	3.3 Meningkatnya penggunaan domain resmi pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2	01	03	Penyusunan aplikasi sistem informasi	Jumlah aplikasi penunjang E-Government yang dikembangkan	4 aplikasi	2 aplikasi	71.280.000	2 aplikasi	155.323.182	2 aplikasi	169.303.160	2 aplikasi	177.768.196	2 aplikasi	183.101.368	14 aplikasi	756.775.906		
Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral SKPD	2	01	01	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase statistik sektoral daerah	60%	80%	28.054.100	80%	32.500.000	80%	35.750.000	80%	39.330.000	100%	43.259.998	100%	178.894.098	Bidang Statistik dan Persandian	Kabupaten Tanah Laut
		2	01	05	Penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral daerah	1 dokumen	1 dokumen	28.054.100	1 dokumen	32.500.000	1 dokumen	35.750.000	1 dokumen	39.330.000	1 dokumen	43.259.998	5 dokumen	178.894.098		
Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	3.4 Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	955.116.083	-	-	-	-	-	-	-	-	955.116.083	Sekretariat	Kabupaten Tanah Laut	
		2	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayar	2 jenis	3 jenis	38.400.000	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	38.400.000			
	3.5 Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan	2	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	4 jenis	34.412.297	-	-	-	-	-	-	-	6 jenis	34.412.297			
		2	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang terpelihara	7 unit	7 unit	57.645.000	-	-	-	-	-	-	-	7 unit	57.645.000			
		2	01	07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materi 6000 dan 3000 yang tersedia	500 lembar	900 lembar	13.505.100	-	-	-	-	-	-	-	1400 lembar	13.505.100			
		2	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	15 jenis	4.136.500	-	-	-	-	-	-	-	15 jenis	4.136.500			
		2	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	0 unit	20 unit	12.382.920	-	-	-	-	-	-	-	20 unit	12.382.920			
		2	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	40 jenis	14.404.000	-	-	-	-	-	-	-	70 jenis	14.404.000			
		2	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	5 jenis	5 jenis	6.492.500	-	-	-	-	-	-	-	5 jenis	6.492.500			
		2	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat yang tersedia	3 jenis	7 jenis	21.024.100	-	-	-	-	-	-	-	10 jenis	21.024.100			
		2	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	350 orang	436 orang	19.684.000	-	-	-	-	-	-	-	786 orang	19.684.000			
		2	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14 SPPD	30 SPPD	311.771.250	-	-	-	-	-	-	-	44 SPPD	311.771.250			
		2	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jumlah SPPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	40 SPPD	304 SPPD	91.410.000	-	-	-	-	-	-	-	344 SPPD	91.410.000			
		2	01	01	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah honorarium pegawai honorer/tidak tetap (PTT) yang terbayarkan	19 orang	19 orang	329.848.416	-	-	-	-	-	-	-	19 orang	329.848.416			
		2	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0%	45%	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	Sekretariat	Luar dan dalam daerah	
		2	01	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal	0 orang	9 orang	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 orang	45.000.000		
		2	01	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	Sekretariat	Pelahiari	
		2	01	01	Penyusunan tabulasi data aset tetap	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset daerah	2 dokumen	2 dokumen	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	4.500.000		
		2	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	B	B	2.551.900	-	-	-	-	-	-	-	-	2.551.900	Sekretariat	Pelahiari	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Target kinerja penyelenggaraan bidang urusan Komunikasi dan Informatika dalam periode 2018-2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1,42	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	2,8
B	SEKRETARIAT							
1	Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai RB SKPD	-	-	80 nilai	82 nilai	84 nilai	86 nilai	86 nilai
3	Nilai SAKIP SKPD	64 nilai	78 nilai	79 nilai	80 nilai	81 nilai	82 nilai	82 nilai
C	BIDANG KOMUNIKASI							
1	Persentase informasi yang disebarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase KIM yang terbentuk dan memanfaatkan teknologi informasi	n/a	27%	27%	27%	27%	27%	100%
D	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT							
1	Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	55,5%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	100%
2	Persentase penggunaan domain tanahlautkab.go.id	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%

E	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN							
1	Persentase statistik sektoral daerah	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%
2	Persentase SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)	n/a	2,4%	50%	20%	20%	7,6%	100%

Berdasarkan tabel 7.1 terkait dengan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja dinas dan 9 (sembilan) indikator pada bidang yang menjadi urusan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun atas dasar visi dan misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam Renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, di mana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal perangkat daerah. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan *good governance* (Pemerintahan yang baik) di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan secara konsisten dalam rangka Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta Membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju **“TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI”**.